



ANALISIS PERAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF LOKAL MELALUI INOVASI "SUKABUMI CREATIVEHUB"

ANALYSIS OF THE ROLE OF FISCAL DECENTRALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL CREATIVE ECONOMIES THROUGH "SUKABUMI CREATIVEHUB" INNOVATION

Riska Saputri¹⁾, Rani Septiani²⁾, Nisrina Nurfauiyyah³⁾, Dairobby Abdillah⁴⁾, Gheril Putra Sumarno⁵⁾, Dewi Febriyanti⁶⁾, Noer Apptika Fujilestari⁶⁾

^{1),2),3),4),5),6)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani. E-mail:

riska.saputri@student.unjani.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata kunci: Desentralisasi fiskal, Ekonomi kreatif, Sukabumi Creativehub, Pertumbuhan ekonomi, Pengembangan lokal	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal melalui studi kasus "Sukabumi Creativehub" dan mengevaluasi dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kota Sukabumi. Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "Sukabumi Creativehub" berhasil menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas, meningkatkan jumlah pelaku industri kreatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Kota Sukabumi. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang perlu diatasi. Kesimpulannya, desentralisasi fiskal efektif dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif lokal, tetapi keberlanjutan program memerlukan strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak.

ARTICLE INFO

Keywords:

Fiscal decentralization,
Creative economy,
Sukabumi Creativehub,
Economic growth, Local
development

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of fiscal decentralization in the development of the local creative economy through the case study "Sukabumi Creativehub" and evaluate its impact on the Gross Domestic Product (GDP) of Sukabumi City. Fiscal decentralization gives local governments greater authority in managing resources and designing programs that suit local needs. Using a qualitative approach with literature study methods, this research collects and analyzes data from various relevant written sources. The research results show that "Sukabumi Creativehub" has succeeded in creating an ecosystem that supports innovation and creativity, increasing the number of creative industry players, and making a significant contribution to Sukabumi City's GDP. However, there are challenges such as limited human resources and budget that need to be overcome. In conclusion, fiscal decentralization is effective in encouraging the development of the local creative economy, but program sustainability requires the right strategy and collaboration of various parties.

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat, sehingga dalam penyebarluasan informasi dapat mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah hanya dalam satu jentikan tangan saja. Hal ini tentu berdampak terhadap sistem politik, sosialm ekonomi, dan budaya secara global.

Pada era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Putra & Yeniwati, 2022). Ekonomi kreatif ini dapat dijadikan andalan dalam meningkatkan perekonomian menggantikan sumber daya alam dan pertanian (Awaludin et al., 2021).

Menurut Sandiaga Salahuddin Uno, menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini didukung oleh data dari (databoks, 2024) pada tahun 2022 sektor ekonomi kreatif berkontribusi 6,54% terhadap nilai total PDB nasional atau mencapai Rp1.280 triliun atau Rp1,28 kuadriliun.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama bagi setiap kota di Indonesia, termasuk Kota Sukabumi. Dalam beberapa tahun terakhir, Sukabumi menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonominya (Prasetyo, 2020). Salah satu faktor yang mendukung pencapaian ini adalah keberhasilan program inovasi "Sukabumi Creativehub." Program ini dirancang untuk mendorong

perkembangan ekonomi kreatif lokal melalui pendekatan desentralisasi, yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan (Kusuma, 2021).

Desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Dalam konteks Sukabumi, desentralisasi ini memungkinkan pelaksanaan program "Sukabumi Creativehub," yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung industri kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sukabumi Creativehub" bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan dukungan bagi para pelaku industri kreatif lokal, seperti pelatihan, akses ke pasar, dan jaringan kolaborasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang baru bagi masyarakat. Dengan adanya "Sukabumi Creativehub," para pelaku ekonomi kreatif dapat lebih mudah berinovasi dan memasarkan produk mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) kota Sukabumi (Fitriani, 2018).

Studi ini akan menggunakan teori desentralisasi fiskal sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas program "Sukabumi Creativehub." Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran desentralisasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif lokal dan bagaimana inovasi program ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi kreatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis peran desentralisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal melalui program "Sukabumi Creativehub" dan dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Kota Sukabumi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang kompleks secara mendalam, serta memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kebijakan dan implementasi program ekonomi kreatif di tingkat lokal.

Metode studi literatur dipilih sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini. Studi literatur melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait program "Sukabumi Creativehub" serta kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep, teori, dan temuan empiris yang

berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menganalisis literatur yang ada, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan terkini tentang peran desentralisasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran desentralisasi fiskal dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal melalui Inovasi "Sukabumi Creativehub"

Program "Sukabumi Creativehub" merupakan salah satu inisiatif yang menonjol dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Program ini dirancang untuk menyediakan fasilitas dan dukungan bagi para pelaku industri kreatif di Sukabumi, dengan tujuan meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Implementasi program ini mencerminkan bagaimana desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui desentralisasi, Sukabumi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang semakin diakui sebagai kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Program Sukabumi creative hub merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Walikota sukabumi periode 2018-2024 sebagai bentuk pengembangan ekonomi kreatif di kota sukabumi, adanya program ini agar dapat mewujudkan ekonomi daerah yang maju pada sektor kreatif. Selama 5 tahun ini dapat terlihat bahwa pelaksanaan program sukabumi creative hub sudah dilakukan secara baik oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata beserta Pengelola Sukabumi creative Hub, dalam keberhasilannya tidak luput dari pengaruh desentralisasi Fiskal sebagai tumpuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui inovasi Sukabumi creative Hub, dimana terdapat 3 Variabel yang menjadi acuan Desentralisasi fiskal sebagai pengaruh besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif, Variabel yang dimaksud dapat diurai dibawah:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah sukabumi untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai bentuk mewujudkan atau mencapai target dan skala yang telah dibuat dalam bentuk roadmap kegiatan yang memuat tahapan pengembangan tiap tahun yang dilakukan oleh Sukabumi Creative Hub, Pendapatan tersebut dapat dilihat pada Grafik Pendapatan Daerah.

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

JENIS	ANGGARAN/PAGU	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.133.340.000.000	1.256.510.000.000	110,87
PAJAK ASLI DAERAH	348.033.000.000	406.055.000.000	116,71
Pajak Daerah	58.053.000.000	69.078.000.000	119,21

	Retribusi Daerah	5.086.000.000	6.040.000.000	109,23
	Kekayaan daerah	4.082.000.000	5.030.000.000	104,20
	Lain-lain	279.110.000.000	325.034.000.000	116,56
TKDD		687.093.000.000	708.093.000.000	103,05
	Pemerintah Pusat	687.093.000.000	708.093.000.000	103,05
	Antar Daerah	80.020.000.000	124.060.000.000	155,35
PENDAPATAN LAINNYA		98.080.000.000	141.003.000.000	145,27
	Pendapatan Hibah	1.050.000.000	1.050.000.000	100,0
	Lain-lain	15.038.000.000	14.093.000.000	97,09

Sumber: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan, 2023

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan Jumlah Pendapatan daerah Kota sukabumi dimana pada Pajak asli Daerah memiliki nilai Realisasi sebesar 116,71% dimana Pajak Tersebut berasal dari Pajak Hotel,Pajak Restoran,Pajak Hiburan,Pajak Reklame,Pajak penerangan Jalan,Pajak Mineral bukan logam,dll. Penerimaan Pajak Asli Daerah maraup nilai Realisasi dengan Nilai 406,55 Milyar,lalu ada TKDD dengan nilai Realisasi sebesar 708,93 Milyar dengan persentasi antara anggaran dan realisasi sebesar 103,05%,TKDD ini berasal dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat(PTPP) dan Pendapatan transfer antar Daerah (PTAD),menjadikan TKDD menjadi pendapatan pemerintah kota sukabumi yang terbesar. Terakhir ada pendapatan Lainnya yang berasal dari penghasilan Hibah dan lainnya sebesar 141,03 Milyar dengan persentase selisih antara nilai realisasi dengan Anggaran/Pagu sebesar 145,27%.

Dengan adanya nilai Realisasi yang melebihi target pagu maka Penerimaan pendapatan Daerah kota Sukabumi bisa disebut Surplus,hal ini menjadi pengaruh yang cukup besar bagi pemerintah Daerah untuk melakukan pengembangan ekonomi kreatif dimana anggaran yang di alokasikan terhadap pengembangan akan bertambah dan target atau capaian yang akan dicapai akan terealisasi.

2. Pengeluaran Daerah

Tabel 2. Pengeluaran belanja Kota Sukabumi

JENIS	ANGGARAN/PAGU	REALISASI	%
BELANJA DAERAH	1.156.086.000.000	1.283.060.000.000	110,91
BELANJA PEGAWAI	559.092.000.000	534.080.000.000	95,39

BARANG DAN JASA		470.091.000.000	566.052.000.000	120,30
MODAL		62.000.000.000	103.051.000.000	166,96
BELANJA LAINNYA		64.004.000.000	78.095.000.000	123,39
	Belanja Hibah	49.061.000.000	65.042.000.000	131,86
	Bantuan Sosial	4.092.000.000	7.039.000.000	150,09
	Tidak terduga	9.050.000.000	6.014.000.000	64,67

Berdasarkan tabel 2. didapatkan bahwa nilai belanja Daerah kota Sukabumi memiliki nilai Realisasi sebesar 1.283,60 Milyar dengan selisih Anggaran pagu sebesar 110,91% menandakan pengeluaran kota sukabumi melebihi dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran ini meliputi Belanja pegawai dengan nilai realisasi sebesar 534,80 Milyar dengan selisih persentasi dengan pagu anggaran sebesar 95,39%,Belanja Barang dan Jasa dengan nilai realisasi sebesar 566,52 Milyar dengan selisih persentasi dengan pagu anggaran sebesar 120,30%,Belanja Modal sebesar 103,51 Milyar dengan selisih persentasi dengan pagu anggaran sebesar 166,96% artinya pengeluaran di Modal mengalami kelebihan dalam nilai realisasinya yang cukup besar,dan yang terakhir ada Belanja lainnya dengan nilai realisasi sebesar 78,95 Milyar dengan cakupan Belanja hibah,bantuan sosial dan pengeluaran tidak terduga,selisih antara realisasi dengan pagu anggaran sebesar 123,39%.

Adanya pendapatan pemerintah yang bisa disebut sebagai surplus tidak berimbang dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang melebihi batas dari pagu anggaran yang telah di keluarkan,hal ini dapat mengakibatkan nilai anggaran belanja daerah yang Defisit dan harus menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal di daerah.

3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal yaitu kemampuan fiskal suatu daerah tersebut dalam membiayai belanja daerah dari sumber dayanya sendiri yaitu Pendapatan asli daerah (PAD). Kemampuan keuangan daerah dapat diklafikasikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung pada tingkat kemandirian keuangannya (Shara Ningsih et al., 2023) yang dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3. Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0 – 25 %
Rendah	25 – 50%
Sedang	50 – 75%

Tinggi	75 – 100%
--------	-----------

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}}$$

$$= \frac{406,55}{708,93} = 57,7\%$$

Didapatkan bahwa nilai kemandirian kota sukabumi berada di angka 57,7% yang artinya kota sukabumi memiliki tingkat Kemampuan daerah Sedang antara 50 – 75% dengan tingkat pendapat PAD sebesar 406,55 Milyar dan dana dari pemerintah pusat sebesar 708,93 Milyar. Dari hasil ini pemerintah daerah kota sukabumi bisa disebut sudah mandiri dalam mendanai belanja daerahnya sendiri. Lalu selanjutnya ada tabel Pembiayaan daerah yang menjadi salah satu indikator dalam kemandirian fiskal.

Tabel 4. Pembiayaan Daerah

JENIS	ANGGARAN PAGU	REALISASI	%
PEMBIAYAAN DAERAH	23.052.000.000	72.002.000.000	306,43
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.002.000.000	75.058.000.000	279,69
Anggaran tahun Sebelumnya	27.002.000.000	75.058.000.000	279,67
Pemberian pinjaman daerah	0.0	0.1	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.050.000.000	3.050.000.000	100,0
Penyertaan Modal Daerah	3.050.000.000	3.050.000.000	100,0

Sumber: Portal Data SIKD DJPK Kementerian Keuangan 2023

Dari tabel 4. didapatkan bahwa nilai pembiayaan daerah memiliki nilai realisasi sebesar 72,2 Milyar dengan selisih pagu anggaran sebesar 306,43%, hal ini menjadi nilai surplus untuk realisasi yang melebihi batas anggaran, lalu ada Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 75,58 Milyar dengan selisih pagu anggaran sebesar 279,69% yang terdiri atas anggaran tahun sebelumnya dan pemberian pinjaman daerah dengan Nilai 0. Terakhir ada pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 3,50 Milyar dengan selisih pagu anggaran sebesar 100% atau bisa disebut sesuai dengan batas anggaran yang di berikan.

Dari hasil 3 variabel diatas menjadikan Desentralisasi fiskal menjadi pengaruh besar dalam menjalankan kemampuan pemerintah kota sukabumi dengan cara pendanaan Modal untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui inovasi sukabumi creative

hub, dimana antara pendapatan, pengeluaran dan Kemandirian fiskal kota sukabumi harus sejalan dengan program dan inovasi yang muncul seperti pengembangan ekonomi kreatif melalui sukabumi creative hub ini, hal ini dilakukan agar program bisa dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.

Salah satu indikator keberhasilan "Sukabumi Creativehub" adalah peningkatan jumlah pelaku industri kreatif yang terdaftar dan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Pelatihan dan workshop yang diadakan oleh Creativehub tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi peserta, tetapi juga memperluas jaringan dan peluang kolaborasi antar pelaku industri. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dukungan dalam bentuk pelatihan dan akses ke pasar dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif (UNCTAD, 2018). Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan, industri kreatif di Sukabumi dapat lebih kompetitif di pasar lokal maupun nasional.

Selain itu, "Sukabumi Creativehub" juga berperan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas. Keberadaan hub ini memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi antar pelaku industri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk-produk kreatif yang inovatif dan bernilai tambah tinggi. Sebagai contoh, beberapa produk kerajinan tangan dan fashion yang dikembangkan melalui Creativehub telah berhasil menarik perhatian pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan para pengrajin lokal. Inisiatif ini membuktikan bahwa dengan lingkungan yang mendukung, pelaku ekonomi kreatif dapat lebih produktif dan inovatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi inovasi "Sukabumi Creativehub" dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal Kota Sukabumi

Dari sisi ekonomi, kontribusi "Sukabumi Creativehub" terhadap PDB Kota Sukabumi juga mulai terlihat. Menurut data yang diperoleh dari laporan tahunan Creativehub, terdapat peningkatan signifikan dalam kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB kota dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Creativehub efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini tidak hanya berasal dari peningkatan produksi dan penjualan produk kreatif, tetapi juga dari peningkatan lapangan kerja yang diciptakan oleh industri ini. Penelitian oleh Bekraf (2019) menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi.

Namun, meskipun "Sukabumi Creativehub" telah menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan program ini. Salah satu tantangan terbesarnya adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi kreatif. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal, yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kreatif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan

dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri, akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang tersebut.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Meskipun desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, seringkali anggaran yang tersedia masih terbatas. Oleh karena itu, perlu ada strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, serta upaya untuk menarik investasi dari sektor swasta dan kerjasama dengan pihak internasional. Infrastruktur yang memadai, seperti ruang kerja bersama (co-working space), studio, dan fasilitas produksi, juga penting untuk mendukung aktivitas kreatif dan meningkatkan produktivitas pelaku industri.

Dalam konteks kebijakan, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku industri untuk berkembang (Kusuma, 2016). Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa karya kreatif mendapatkan penghargaan yang layak dan tidak disalahgunakan.

Keberhasilan "Sukabumi Creativehub" dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kontribusinya terhadap PDB Kota Sukabumi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan memberikan kewenangan dan fleksibilitas kepada pemerintah daerah, desentralisasi memungkinkan pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi di era globalisasi. Keberlanjutan dan peningkatan program seperti "Sukabumi Creativehub" memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berperan signifikan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi melalui inisiatif "Sukabumi Creativehub." Program ini berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dengan menyediakan fasilitas, pelatihan, dan akses pasar bagi para pelaku industri lokal. Keberhasilan "Sukabumi Creativehub" terlihat dari peningkatan jumlah pelaku industri kreatif yang aktif, peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB Kota Sukabumi, serta peningkatan lapangan kerja yang diciptakan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta infrastruktur yang belum memadai, perlu terus diatasi melalui strategi yang efektif, pendidikan dan pelatihan intensif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Evaluasi dan perbaikan regulasi serta perlindungan hak kekayaan intelektual juga merupakan

aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan program ini. Keberhasilan "Sukabumi Creativehub" menunjukkan bahwa dengan desentralisasi fiskal yang tepat, pemerintah daerah dapat lebih responsif dan inovatif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A/RES/48/104. "Declaration on the Elimination of Violence against Women." 1993. english.
- Anan, Edy. "Effect of Fiscal Desentralization and Region-wide Corruption Level in Indonesia." *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia* (2019): 246-251.
- Arif, Muhammad Zeeshan and Muhammad Zubair Chishti. "Analyzing the Effectiveness of Fiscal Decentralization in Economic Growth: The Role of Institutions." *Iranian Economic Review* 26.2 (2022): 325-341.
- Babatunde, Ekundayo B. and Babatunde E. Durowaiye. "The Conception of 'Sex' and 'Gender' as Background to Inequities Faced by Women." *The Journal of Pan African Studies*, vol.7, no. 8, (March 2015): 64-79. English.
- Bernard, Miriam, Pat Chambers and Gillian Granville. "Women ageing:changing identities, challenging myths." Bernard, Miriam, et al. *Women Ageing Changing identities, challenging myths*. London: Routledge, 2000. 10. English.
- Bird, Richard Miller. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Center forPolicy Research (CPR) at the Maxwell School of Syracuse University. "Quality of Life for All Ages, By Design, A conversation with Patricia Moore." Policy Brief. No. 46/2012. English.
- Coomarswamy, Radhika. "Human Security and Gender Violence." *Economic and Political Weekly*, Vol. 40, No. 44/45 (Oct. 29 - Nov. 4, 2005): 4729-4736. english.
- Development, United Nations Conference On Trade And. "Perdagangan dan Kewirausahaan di Indonesia." 2023.
- Dr. Ari riswanto, M. Pd., MM. *Ekonomi Kreatif (Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Penyunt. Sepriano. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Hoffman. "Wathful eye in nursing homes." *New York Times & http://well.blogs.nytimes.com/2013/11/18/watchful-eye-in-nursing-homes/?_r=0*, Accessed on 26th March, 2016 18th at 4:31 PM November 2013. English.

- Mackinnon, Catherine A. "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory." *Signs*, Vol. 7, No. 3, *Feminist Theory*, The University of Chicago Press ((Spring, 1982),): 515-544. English.
- Oluyko, Vitaliy, et al. "Fiscal Desentralization Practies in Developing Countries." *Cuestiones Politicas* 40.73 (2022): 128-150.
- SCALE. "Khatoon Nisa v. State of U.P. and Ors." 2002 (6) SCALE 165.
- SCC. "Danial Latifi and another v. Union of India." (2001) 7 SCC 740.
- . "Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum And Ors." 1985 SCC (2) 556.
- Tambunan, Salwa Fadhilah Haya dan Khairina. "Pengaruh Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif dan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen* Vol. 02.No. 01 (2022).
- Telaumbanua, Ya'aman and Sirojuzilam. "The Influence of Fiscal Decentralization of Economic Growh in Nias Islands." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2.10 (2023): 3402-3413.
- Wahyuningsih, Sri. "Pendekatan Ekonomi kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Pedekik)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.2 (2019).
- www.judis.nic.in. "Shamim Bano vs Asraf Khan." CRIMINAL APPEAL NO.820 OF 2014 (Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 4377 of 2012).